



Advokasi Anggaran *Water Sanitation And Hygiene* (Wash) Berbasis *Collaborative Governance* Di Tanjung Paser, Tangerang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Qofifah Pujawati Universitas Muhammadiyah Jakarta 23010200060@student.umj.ac.id Mawar Universitas Muhammadiyah Jakarta Tsaltsa Arsanti Universitas Muhammadiyah Jakarta	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Pujawati, Q., Mawar & Arsanti, T. (2026). Advokasi Anggaran *Water Sanitation And Hygiene* (Wash) Berbasis *Collaborative Governance* Di Tanjung Paser, Tangerang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2196-2202.

Abstrak

Wilayah pesisir memiliki tantangan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar *water, sanitation, and hygiene* (WASH). Tanjung Paser, Tangerang merupakan kawasan pesisir yang menghadapi persoalan serius terkait akses WASH yang belum memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya keterlibatan multipihak dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model advokasi anggaran WASH urgensi *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi anggaran WASH yang belum efektif mensyaratkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, pemanfaatan data berbasis komunitas sebagai instrumen advokasi, serta pelibatan aktif kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Prioritas advokasi difokuskan pada peningkatan alokasi anggaran sanitasi dalam APBD, penyusunan regulasi lokal tentang WASH pesisir, dan penguatan kapasitas komunitas dalam pemantauan penggunaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan *collaborative* dalam advokasi anggaran WASH tidak hanya meningkatkan efektivitas advokasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir.

Kata Kunci: advokasi anggaran, WASH, urgensi, *collaborative governance*, masyarakat pesisir, Tanjung Paser,

Abstract

Coastal areas face specific challenges in meeting the basic needs of water, sanitation, and hygiene (WASH). Tanjung Pasir, Tangerang is a coastal area facing serious issues related to inadequate WASH access, limited local government budget, and low multi-stakeholder involvement in development planning. This research aims to analyze the WASH budget advocacy model with an emphasis on collaborative governance involving the government, civil society organizations, local communities, and the private sector. The research method used is descriptive qualitative with participatory observation techniques. The research results indicate that the ineffective WASH budget advocacy requires structured multi-party collaboration, the use of community-based data as an advocacy instrument, and the active involvement of vulnerable groups, especially women and children. Advocacy priorities are focused on increasing the allocation of sanitation budgets in the regional budget (APBD), drafting local regulations on coastal WASH, and strengthening community capacity in monitoring budget usage. These findings affirm that a collaborative approach in WASH budget advocacy not only enhances the effectiveness of advocacy but also strengthens government accountability in fulfilling the basic rights of coastal communities.

Keywords: budget advocacy, WASH, urgency, collaborative governance, coastal communities, Tanjung Pasir,

A. Pendahuluan

Wilayah pesisir memiliki peran strategis secara ekologis, ekonomi, dan sosial, namun sebagai kawasan transisi antara daratan dan lautan. Wilayah ini rentan terhadap berbagai tantangan pembangunan, seperti perubahan iklim dan kekurangan layanan dasar. Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higienitas (WASH) adalah salah satu masalah mendasar yang masih membelit masyarakat pesisir Indonesia. Keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi dan keberpihakan anggaran pemerintah daerah. Tata kelola wilayah pesisir yang baik menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Sebagai kawasan yang berada pada batas antara daratan dan lautan, wilayah pesisir rentan terhadap berbagai tekanan pembangunan yang bersifat multidimensi, mulai dari perubahan iklim, abrasi, pencemaran lingkungan, hingga ketimpangan akses layanan dasar. Namun demikian, masyarakat pesisir di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, dan higienitas atau yang lazim dikenal dengan istilah WASH (Satriawan et al., 2022)

Urgensi WASH bagi masyarakat pesisir tidak dapat dilepaskan dari konteks kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Menurut laporan WHO dan UNICEF (2019), sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki layanan air minum yang dikelola dengan aman dan 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan aman. Di tingkat nasional, buruknya kondisi sanitasi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 56 triliun per tahun atau setara 2,3% PDB Indonesia, sebagaimana temuan studi *World Bank* yang secara berulang dikutip dalam forum kebijakan Bappenas (Bappenas, 2020). Kesenjangan ini tampak nyata pada level lokal di daerah Tanjung Pasir yang ketersediaan sarana air bersih dan jamban masih belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perubahan perilaku sanitasi masyarakat. Perempuan dan anak-anak pesisir merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk defisit WASH, baik dari aspek kesehatan reproduksi, keselamatan, maupun potensi kehilangan waktu produktif akibat tugas pengambilan air yang jauh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi dalam WASH merupakan langkah strategis yang akan memberikan manfaat ganda bagi peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dari perspektif regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mendukung pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengatur mekanisme penyediaan air minum yang aman bagi seluruh masyarakat. Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-6 secara eksplisit menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030. Namun, implementasi kebijakan tersebut di wilayah pesisir masih jauh dari harapan akibat keterbatasan alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah yang menangani sektor WASH.

Pengelolaan program WASH bagi masyarakat pesisir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Program WASH yang hanya dirancang secara *top-down* tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik komunitas lokal cenderung tidak berkelanjutan dan kurang efektif (Suhardiman et al., 2019). Oleh karena itu, keterlibatan aktif komunitas dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program WASH menjadi unsur kritis yang menentukan keberhasilan program. Pendekatan *community-based water and sanitation management* terbukti meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan keberlanjutan layanan WASH di komunitas terpencil maupun pesisir. Lebih jauh, pengelolaan program yang efektif juga mensyaratkan ketersediaan anggaran yang memadai, yang pada gilirannya menuntut adanya proses advokasi yang terencana dan sistematis terhadap pemerintah daerah.

Advokasi anggaran untuk sektor WASH merupakan salah satu strategi kunci dalam memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan WASH masyarakat. Advokasi anggaran merupakan proses yang sistematis dan terencana untuk memengaruhi keputusan alokasi anggaran pemerintah melalui penggunaan data, pembangunan koalisi, dan mobilisasi publik (Umar & Lestari, 2021). Di wilayah pesisir seperti Tanjung Barat, advokasi anggaran WASH menjadi semakin penting mengingat posisi marginal komunitas pesisir dalam proses penganggaran pemerintah daerah, sementara kolaborasi multipihak yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam dialog kebijakan anggaran.

Namun demikian, kajian tentang WASH, collaborative governance, dan advokasi anggaran selama ini menyisakan sejumlah kesenjangan. Studi tata kelola kolaboratif sejauh ini banyak berfokus pada konteks perkotaan atau wilayah dengan kapasitas kelembagaan yang relatif memadai, sementara kajian pada wilayah kawasan pesisir seperti Tanjung Pasir masih terbatas. Sisi lain dari studi WASH di tingkat lokal, termasuk penelitian terdahulu di Tanjung Pasir sendiri, umumnya berhenti pada identifikasi faktor perilaku dan ketersediaan sarana, namun belum banyak menyentuh dimensi proses politik anggaran yang menentukan keberlanjutan penyediaan layanan tersebut. Dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi advokasi anggaran WASH yang dibangun di atas kebutuhan komunitas dan kolaborasi multipihak, dengan menempatkan Tanjung Pasir sebagai kawasan pesisir yang secara struktural rentan terpinggirkan dalam proses penganggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi anggaran WASH *collaborative governance* di Tanjung Pasir, Tangerang, sekaligus mengidentifikasi peran dan prioritas masing-masing pemangku kepentingan dalam proses advokasi tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana pendekatan kualitatif dilakukan melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Hasnunidah, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan “Coaching Bulanan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Tangerang” yang diselenggarakan oleh koalisi PRIMA, dengan peran sebagai pendampingan ibu-ibu pesisir sekaligus tenaga magang Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) yang membantu saat pelaksanaan kegiatan.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan peneliti Seknas FITRA serta observasi partisipatif terhadap kegiatan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi (laporan kegiatan, notulensi, dan peraturan perundang-undangan), artikel berita, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis dan diverifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang melakukan advokasi anggaran WASH yang dipahami oleh warga dan pegiat komunitas bukan semata-mata sebagai aktivitas formal, melainkan sebagai respons nyata terhadap kondisi hidup sehari-hari yang kekurangan air bersih dan sanitasi layak. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa warga secara aktif membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya anggaran pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan WASH mereka. Di balai warga, ruang diskusi komunitas, dan forum musrenbang, dan bagaimana advokasi anggaran dimaknai sebagai cara satu-satunya yang dianggap sah oleh masyarakat untuk menuntut perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi lingkungan mereka yang belum tertangani secara memadai.

Pembahasan berikut membahas tiga temuan utama yang paling relevan menjawab tujuan penelitian, yaitu (1) kondisi WASH di Tanjung Pasir, (2) collaborative governance dalam advokasi anggaran, serta (3) responsivitas peran pemerintah tangerang dalam advokasi WASH. Tiga hasil utama menjadi pusat pembahasan penelitian ini, yang secara langsung menjawab tujuan penelitian. Pertama, penelitian menemukan bahwa kondisi air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di Tanjung Pasir masih menghadapi sejumlah masalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan layanan WASH belum sepenuhnya optimal dan memerlukan intervensi yang berkelanjutan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil seperti Seknas FITRA, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lainnya, telah terlibat dalam mendukung anggaran WASH melalui kerja sama pemerintahan. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh komitmen para aktor, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan koordinasi antar pihak. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti kampanye WASH dengan menyediakan ruang komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil dan memperhatikan masalah sanitasi dan air bersih. Tetapi tingkat responsivitas ini belum sepenuhnya diikuti oleh penerapan kebijakan yang lebih cepat dan pembagian anggaran yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat pesisir.

Kondisi Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di Tanjung Pasir

Hasil menunjukkan bahwa kondisi WASH di Tanjung Pasir, Tangerang masih berada pada kategori kritis. Sebagian besar warga mengandalkan air sumur yang telah terkontaminasi oleh air laut sebagai sumber air minum dan kebutuhan domestik. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemetaan komunitas, sekitar 65% rumah tangga di wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai standar Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. Sementara itu, cakupan kepemilikan jamban sehat baru mencapai 47% dari total kepala keluarga, dengan sebagian warga masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di area pantai dan tambak (BPS Tangerang, 2022). Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada tingginya angka kesakitan diare, terutama pada anak-anak di bawah lima tahun. Keterbatasan akses WASH di Tanjung Pasir diperparah oleh rendahnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor ini.

Anggaran Sanitasi, Air Bersih, dan Persampahan

Organisasi Perangkat Daerah	Alokasi	Persentase
Dinas Lingkungan Hidup	100.459.553.950,00	1,15%
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	107.243.467.482,00	1,23%
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	358.151.608.684,20	4,10%

total persentase sektor WASH sekitar 6,48% dari total belanja daerah (Rp.8.745.562.891.409) tahun anggaran 2026

Sumber: APBD Kabupaten Tangerang TA.2026

Berdasarkan data alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, total anggaran yang dialokasikan untuk sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di Kabupaten Tangerang mencapai Rp565.854.630.116,20 atau sekitar 6,48% dari total belanja daerah sebesar Rp8.745.562.891.409. Alokasi tersebut terbagi ke dalam tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp358,15 miliar (4,10%), Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman sebesar Rp107,24 miliar (1,23%), serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100,46 miliar (1,15%). Dari ketiga OPD tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memperoleh porsi anggaran terbesar karena memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Meskipun demikian, secara keseluruhan porsi anggaran WASH masih relatif kecil dibandingkan total belanja daerah, sehingga menunjukkan bahwa sektor air bersih, sanitasi, dan persampahan belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan akses layanan WASH yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mulai menggulirkan program gerakan bersama rakyat mengatasi kawasan padat, kumuh, dan miskin melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dengan upaya program mandiri ketahanan pangan, kesehatan, pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta program aksi kreatif dan inovatif (Kompas.id, 2022). Kabupaten Tangerang terus berupaya mengatasi permasalahan kesehatan dengan program penataan secara infrastruktur, air bersih, sanitasi, termasuk memperbaiki kawasan padat kumuh dan menciptakan kawasan mangrove yang mumpuni. Program unggulan Gerbang Mapan yang telah masuk kedalam RPJMD dan telah direvitalisasi untuk periode 2019-2023 difokuskan untuk penataan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang.

***Collaborative Governance* dalam Advokasi WASH**

Praktik advokasi anggaran WASH di Tanjung Pasir memperlihatkan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, koalisi masyarakat sipil PRIMA, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas), serta Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Tangerang sebagai wadah konsolidasi warga. Pola interaksi ini sejalan dengan model collaborative governance yang dikemukakan (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan bahwa kolaborasi lintas aktor akan berhasil apabila dibangun melalui dialog tatap muka, penumbuhan kepercayaan secara bertahap, dan pencapaian “kemenangan kecil” yang memperkuat komitmen bersama. Dalam konteks Tanjung Pasir, forum coaching bulanan KPPI berfungsi sebagai ruang membangun kepercayaan tersebut, sebelum isu WASH diangkat secara lebih formal ke forum musrenbang.

Dalam praktiknya, koalisi PRIMA dan Seknas FITRA menjaga independensi advokasi melalui tiga mekanisme. Pertama, koalisi tetap bersandar pada data primer yang dihimpun secara independen dari observasi dan pendampingan komunitas, bukan pada data maupun narasi yang disediakan pemerintah daerah, sehingga argumentasi advokasi tidak mudah dibelokkan mengikuti kepentingan birokrasi. Kedua, koalisi mempertahankan basis legitimasi ganda baik dari kedekatan personal dengan policy champion di internal pemerintahan, maupun dari mandat kolektif warga Tanjung Pasir yang dikonsolidasikan melalui KPPI sehingga berkelanjutan advokasi yang tidak bergantung pada satu pintu masuk institusional saja. Ketiga, forum-forum konsolidasi warga seperti coaching bulanan dan diskusi balai warga tetap diselenggarakan secara mandiri oleh komunitas, terlepas dari kalender resmi pemerintahan, sehingga memungkinkan evaluasi kritis terhadap respons pemerintah daerah Tangerang tanpa tekanan birokratis langsung. Batas antara kolaborasi dan kooptasi dalam kerangka ini dapat dipahami melalui dimensi *principled engagement* yang diajukan (Ansell & Gash, 2008): selama forum kolaborasi tetap terbuka bagi negosiasi kepentingan yang setara antaraktor dan proses pengambilan keputusan tetap transparan, hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai kolaborasi *genuine*.

Responsivitas Peran Pemerintah Tangerang dalam Advokasi WASH

Responsivitas pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap advokasi WASH di Tanjung Pasir dapat dilihat dari sejumlah langkah kebijakan yang diambil pada tingkat kabupaten. Dalam penyampaian nota keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan belanja daerah sebesar Rp 9,11 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan arah kebijakan fiskal yang secara eksplisit memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar di samping pembangunan infrastruktur publik dan pemerataan ekonomi (S. D. K. Tangerang, 2025). Pada saat yang sama, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 mencatat keberlanjutan program Talenta Unggul Generasi Sehat yang menyasar penurunan akses masyarakat terhadap air bersih (P. K. Tangerang, 2025). Capaian sektor sanitasi Kabupaten Tangerang bahkan turut ditampilkan dalam forum United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) sebagai kandidat penghargaan internasional atas inovasi programnya (B. P. D. K. Tangerang, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya menutup diri terhadap isu WASH, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari agenda pembangunan yang terus digulirkan.

Meskipun demikian, responsivitas yang tampak pada level kebijakan makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam intervensi yang spesifik menjawab persoalan WASH di kawasan pesisir seperti Tanjung Pasir. (Dwiyanto, 2006) membedakan responsivitas birokrasi ke dalam dua dimensi, yakni kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dan kesediaan menindaklanjutinya melalui kebijakan maupun alokasi anggaran yang konkret. Dari dimensi pertama, pemerintah daerah relatif responsif: forum-forum komunikasi dengan organisasi

masyarakat sipil dibuka, dan isu sanitasi pesisir mendapat tempat dalam program prioritas kesehatan lingkungan. Namun dari dimensi kedua, tindak lanjutnya masih terbatas. Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, porsi anggaran WASH dalam APBD Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 6,48% dari total belanja daerah, dan hingga saat ini belum tersedia regulasi lokal yang secara khusus mengatur penyediaan layanan WASH di kawasan pesisir. Program Gerbang Mapan yang telah berjalan sejak 2014 pun dirancang sebagai program penataan kawasan pesisir secara umum, mencakup ketahanan pangan, permodalan usaha mikro, kecil dan menengah, hingga penataan permukiman kumuh, sehingga alokasinya untuk WASH tidak secara eksklusif merespons agenda advokasi yang diusung KPPI dan koalisi PRIMA.

Pola ini sejalan dengan argumen Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi lintas aktor kerap berhenti pada tahap membangun kepercayaan melalui dialog sebelum berlanjut ke komitmen substantif berupa keluaran kebijakan bersama. Forum coaching bulanan KPPI dan ruang diskusi balai warga di Tanjung Pasir berhasil membuka jalur komunikasi antara warga dan pemerintah daerah, tetapi belum diikuti dengan mekanisme formal yang mengikat pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi kebutuhan WASH di kawasan tersebut. Dengan kata lain, responsivitas pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap advokasi WASH di Tanjung Pasir masih berada pada tahap responsivitas prosedural, yaitu kesediaan mendengar dan membuka ruang partisipasi, dan belum sepenuhnya bergerak menuju responsivitas substantif yang tercermin dari perubahan kebijakan anggaran yang secara eksplisit berpihak pada masyarakat pesisir.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar berupa keterbatasan akses air bersih, rendahnya kepemilikan sanitasi layak, serta belum optimalnya alokasi anggaran daerah yang mendukung pemenuhan layanan WASH. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Dalam menghadapi persoalan tersebut, praktik advokasi anggaran yang dilakukan melalui pendekatan *collaborative governance* memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Seknas FITRA, Koalisi PRIMA, KPPI Tangerang, dan masyarakat pesisir mampu membangun ruang dialog, memperkuat penggunaan data berbasis komunitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih dihadapkan pada tantangan berupa belum kuatnya komitmen pemerintah dalam menerjemahkan hasil advokasi ke dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat pesisir. Responsivitas Pemerintah Kabupaten Tangerang telah terlihat melalui penyediaan ruang komunikasi, pelaksanaan program pembangunan kawasan pesisir, serta peningkatan perhatian terhadap isu sanitasi dan air bersih. Namun, respons tersebut masih berada pada tataran prosedural dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk regulasi khusus maupun peningkatan proporsi anggaran WASH yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tanjung Pasir. Oleh karena itu, penguatan *collaborative governance* perlu diarahkan pada kolaborasi yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga advokasi anggaran tidak hanya menghasilkan ruang partisipasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan kebijakan dan pengalokasian anggaran yang lebih responsif terhadap pemenuhan layanan WASH. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan advokasi anggaran WASH tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas kolaborasi antaraktor, komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2020). *Laporan Nasional Sanitasi Indonesia: Pencapaian SDGs Target 6*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hasnunidah, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Media Akademi.
- Kompas.id. (2022). *Pemkab Tangerang Berkomitmen Tuntaskan Penataan Pesisir*. Kompas.id.

<https://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/27/pemkab-tangerang-berkomitmen-tuntaskan-penataan-pesisir>

Organization, W. H. (2019). *1 in 3 people globally do not have access to safe drinking water – UNICEF, WHO*. <https://www.who.int/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who>

Satriawan, E., Oktaviani, R., & Hadiwijoyo, S. S. (2022). Akses Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Masyarakat Nelayan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45–63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7123>

Suhardiman, D., Clement, F., & Bharati, L. (2019). Community-Based Water Management and Service Delivery in Coastal Areas. *Water Policy*, 21(4), 678–695. <https://doi.org/10.2166/wp.2019.044>

Tangerang, B. P. P. D. K. (2023). *Program Sanitasi Kabupaten Tangerang Jadi Sorotan di Acara Internasional, Target Award UCLG*. Bappeda Kabupaten Tangerang. <https://bappeda.tangerangkab.go.id/detail-berita/program-sanitasi-kabupaten-tangerang-jadi-sorotan-di-acara-internasional-target-award-uclg>

Tangerang, B. P. S. K. (2022). *Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. <https://tangerangkab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/c76e5912ec13cec8971be1d8/statistik-daerah-kabupaten-tangerang-2022.html>

Tangerang, P. K. (2025). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tangerang, S. D. K. (2025). *DPRD Kabupaten Tangerang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026*. Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. <https://setwan.tangerangkab.go.id/detail-berita/dprd-kabupaten-tangerang-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-penjelasan-bupati-terhadap-raperda-apbd-tahun-anggaran-2026>

Umar, N., & Lestari, P. (2021). Strategi Advokasi Anggaran Kesehatan Berbasis Data di Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 112–130. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2021.009.01.07>